



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1980  
TENTANG  
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA RUTIN  
TAHUN ANGGARAN 1979/1980  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1979/1980 yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam. program, kegiatan, Departemen/Lembaga bersangkutan dan jenis pengeluaran ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Stbl.1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2800)
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131) ;
4. Peraturan Pengurusan Tata-usaha Keuangan Negara (Regelen voor het Administratief Beheer Stbl. 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

#### Pasal 1

- (1) Sub Sektor-Sub Sektor dari Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1979/1980 sebagaimana telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 (Lampiran III) diperinci ke dalam program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari yang tertera dalam ayat (1) pasal ini sampai ke dalam kegiatan dan jenis pengeluaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana termuat dalam Lampiran C.1 sampai dengan C.27 Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 2

- (1) Pergeseran jumlah-jumlah dalam dan atau antar kegiatan serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan termaksud dalam Pasal 36 ayat (1), (2), (3),(4), (5), (6), (7), (8), dan (9) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini. diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 1980  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO